

Daftar Pustaka Sementara

Buku dan Jurnal

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 24.
- Achmad Arifulloh, “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2015, Semarang: Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang, hlm. 302.
- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.
- Arianto, H. (2010). *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. *LexJurnalica*, 7(2), 18013.
- Arief. *Op.Cit.* [36].
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 105.
- Bambang Waluyo, *Op.,Cit.*, hlm.3
- Danurdara, Dewa Gede Agung Oka, and Ade Adhari. ‘Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).
- Dewi, Arma. ‘Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi’. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019).
- Dimas Arya Aziza, “Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm. 169, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.31>.
- Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar*, h.17.
- Djulaeka, S. H., and S. H. Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- E.Utrecht. [7].
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 39.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.
- Harahap, Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Hiariej, Eddy Omar Sharif. 'United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia'. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 31, no. 1 (2019).

Ibid [419].

Ibid.

Ibid. [419].

Ibid. [8].

Ibid., hlm. 39.

Ihsan, Reza Noor, and Ifrani Ifrani. 'Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan'. *Al-Adl* 9, no. 3 (2020).

Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Kimberly Ann Elliott, *Corruption and the Global Economy*, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Terjemahan oleh A. Rahman Zaenuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. vii.

Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, (2010), p. 43.

Muliawan, A., & Caniago, C. (2010). Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Jurnalica*, 7(2).

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009).

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2005), hlm. 2.

Pradjonggo, Sridjaja Tjandra, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya.

Prasetyo, T., 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Rohrohmana, B., 2017. Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Yuridika*, 32(2), pp.210-227.

S. H. Djulaeka and S. H. Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 60

S. H. I. Jonaedi Efendi, S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), h. 15.

Satochid Kartanegara. *Loc.Cit.*

Sjafri Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Sugiarto, U. S, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Thesis

Moh, Thamsir. 'Peran Kejaksaan Dalam Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Utang Pengganti Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negri Jambi Tanjung Jabung Timur)'. Phd Thesis, Universitas Batanghari Jambi, 2023.

Ramadannuari, Taufan Panji. 'Kebijakan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia'. Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Ricky Firdinand Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Rumah Dalam Hal Developer Pailit (Studi Kasus Putusan No. 21/Pdt. Sus/Pailit/2020/Pn. Niaga)".

Saputra, Ricky Firdinand. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Rumah Dalam Hal Developer Pailit (Studi Kasus Putusan No. 21/Pdt. Sus/Pailit/2020/Pn. Niaga)'.

Undang-Undang

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

Bagir Manan, <https://ilmuhukumidn.blogspot.com/2019/02/freedom-from-ex-postfactolaw.html#:~:text=Ex%20post%20facto%20artinya%20%E2%80%9Cberlaku,%2Dundang%20secara%20berlaku%20surut%E2%80%9D.&text=Terdakwa%20sekali%2Dsekali%20tidak%20b oleh%20dikenai%20hukuman%20yang%20lebih%20berat.>